BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, belakangan ini Jepang menghadapi permasalahan sosial, salah satunya adalah penurunan angka kelahiran dan meningkatnya angka populasi lanjut usia (lansia). Menurut sumber data yang dikutip oleh Global Health and Medicine, populasi Jepang yang semakin menua yang dapat menimbulkan tantangan/ permasalahan sosial yang serius. Populasi negara ini menua dengan cepat; pada tahun 2017, proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun merupakan persentase terbesar dari seluruh penduduk di seluruh dunia, yaitu 27,7%. Diperkirakan kecenderungan ini akan terus berlanjut, dengan pertumbuhan populasi yang diprediksi mencapai 38,4% pada tahun 2065. Infrastruktur sosial, ekonomi, dan sistem perawatan kesehatan negara ini menghadapi tantangan serius sebagai akibat dari populasi yang menua, yang merupakan konsekuensi dari keberhasilan yang luar biasa dalam peningkatan kesehatan dan pembangunan ekonomi.

Selama dua dekade tersebut, Jepang menghadapi periode pertumbuhan ekonomi yang lambat dan deflasi yang berkelanjutan. Menurut *The Annual Consumer Price Index* (CPI), tingkat inflasi Jepang setiap tahunnya terus meningkat, sehingga memberikan tantangan bagi perekonomian. Sejak pertengahan tahun 1990-an, populasi usia kerja di Jepang telah menurun.

Sementara populasi secara keseluruhan mulai menurun pada tahun 2010-an, populasi usia kerja produktif (15 hingga 64 tahun) mulai menurun secara signifikan. Penurunan demografis ini telah membebani pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, di mana jumlah penduduk dan populasi usia kerja terus meningkat, sementara Jepang menghadapi bonus demografi, di mana populasi usia kerja lebih cepat menurun daripada populasi secara keseluruhan. Meskipun ada kemajuan baru-baru ini, inflasi tetap menjadi isu yang terus berlanjut, yang tentu saja akan berdampak pada aktivitas ekonomi dan harga.

Menurut penelitian yang dianalisis oleh Masazumi Wakatabe (2019), kegagalan Abenomics dimulai dengan kegagalan mencapai target inflasi sebesar 2% dalam periode dua tahun yang ditetapkan oleh Abe setelah terpilihnya menjadi perdana menteri, yang merupakan salah satu kriteria utama keberhasilannya. Selanjutnya, kritik yang datang dari gubernur Bank of Japan (BoJ) yang keluar, Shirakawa, yang menyatakan kekhawatiran bahwa BoJ tidak mampu mengeluarkan ekspektasi pasar melalui Abenomics, menunjukkan bahwa pendekatan terhadap kebijakan moneter yang berisiko. Selain itu, Abenomics dikritik karena dampaknya terhadap devaluasi Yen dan ekonomi negara tetangga. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga dianggap sebagai upaya untuk menurunkan nilai Yen dan meningkatkan supremasi ekonomi nasional Jepang di *expense* negara-negara Asia lainnya. Abenomics juga dikritik karena tidak ada pertumbuhan secara nyata. Ketika pertumbuhan pasar saham Jepang yang diatribusikan kepada Abenomics

disesuaikan dengan depresiasi Yen, tidak ada pertumbuhan nyata yang bisa dialokasikan sama sekali, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa revisi hukum BoJ untuk memungkinkan intervensi politik yang lebih besar dapat mengarah pada pengulangan permasalahan masa lalu, dimana BoJ mendukung mesin perang pemerintah yang mengingatkan pada legislasi tahun 1942.

Konsep *new capitalism* yang diterapkan di Jepang, seperti yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, didefinisikan oleh sebuah konsep yang komprehensif yang bertujuan untuk memperbaharui pertumbuhan ekonomi Jepang melalui strategi dua arah untuk mendorong pertumbuhan dan tingkat daya saing ekonomi C. Gagasan ini menekankan pentingnya peran daya kreatif dari sektor swasta untuk kemakmuran dan ekonomi yang stabil, serta mengatasi berbagai resiko yang menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti inflasi global, perubahan iklim, menurunnya angka kelahiran, dan pasokan energi yang tidak stabil. *New Capitalism* dibentuk untuk mengubah tantangan sosial menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Hal ini melibatkan mobilisasi setiap instrumen kebijakan yang memungkinkan, termasuk anggaran dan perpajakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Perdana Menteri Fumio Kishida memperkenalkan gagasan *new capitalism* dalam pidatonya di New York Stock Exchange (NYSE) untuk mempengaruhi ekonomi global melalui sejumlah strategi ataupun gagasan. Pertama, tentu saja Kishida mengenalkan gagasan ini untuk mengutamakan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jepang yang telah merosot sejak 2 dekade. Kedua, selain menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tentu saja gagasan tersebut juga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi global dengan melakukan upaya pengoptimalan energi kreatif sektor swasta dan meningkatkan investasi modal. Hal tersebut dapat mendorong meningkatkan sejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas global. Kishida juga menekankan bahwa gagasan ini dapat meningkatkan keseimbangan ekonomi global dengan meminimalisir adanya ketimpangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Ketiga, tentu saja Kishida mengenalkan gagasan *new capitalism* juga dapat membantu meningkatkan kerja sama internasional, baik secara mitra perdagangan maupun kerja sama bilateral, dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, keterbatasan energi, dan menurunnya angka usia produktif. Sementara itu, gagasan ini juga dapat menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pekerja, termasuk melalui reformasi *corporate governance*; hal ini dapat berdampak pada kebijakan pendidikan dan pekerjaan di negara lain yang berusaha meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kualitas pekerja (Kizuna, 2022).

Perekonomian Tiongkok telah menjadi raksasa global dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi global, dengan kontribusi hampir 30% dari pertumbuhan global. AS menanggapi dengan negatif sikap Tiongkok yang semakin asertif. Negara-negara kuat ini saling bersaing dalam berbagai hal, termasuk ekonomi (Aini, 2021).

Jepang sebagai ekonomi terbesar ke-4 di dunia setelah AS, Tiongkok, dan Jerman, tentunya turut dalam menanggapi persaingan dua raksasa ekonomi global yaitu AS dan Tiongkok (Kageyama, 2024). Dalam situasi ini, Jepang harus mempertahankan hubungan ekonominya dengan Tiongkok, yang menjadi mitra dagang terbesar Jepang. Jepang telah menunjukkan ketertarikan untuk membangun hubungan ekonomi dengan Tiongkok melalui *Belt Road Inisiative* (BRI), yang merupakan inisiatif infrastruktur global yang diusulkan oleh Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa Jepang ingin memanfaatkan kesempatan ekonomi BRI dan meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi (Matasak, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada strategi Jepang dalam menerapkan gagasan *new capitalism* di tengah persaingan dua raksasa ekonomi dunia, Tiongkok dan AS. Jepang menghadapi tantangan untuk menyesuaikan langkah-langkah konkret kebijakan ekonominya agar tetap mampu beradaptasi dan bersaing dalam dinamika ekonomi global yang terus berubah

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini merumuskan sebuah permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni dalam transformasi struktural ekonomi Jepang, bagaimana Jepang menanggapi rivalitas ekonomi global antara Amerika Serikat dengan Tiongkok melalui gagasan *new capitalism*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Jepang menanggapi persaingan ekonomi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan menggunakan gagasan *new capitalism*. Manfaatnya yaitu memberikan wawasan mengenai peran Jepang dalam merespon ekonomi global dan memahami strategi atau kebijakan dalam mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh persaingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Literature Review

Penelitian dari Kizuna (2022) menyoroti dampak negatif pada pasar saham Jepang pasca terpilihnya Fumio Kishida sebagai perdana menteri. Peneliti ini juga menganalisis kekhawatiran para investor atas potensi pergeseran kebijakan yang dapat mempengaruhi kenaikan perpajakan daripada pertumbuhan, yang berdampak pada penurunan pasar yang signifikan. Studi ini menganalisis pendekatan *new capitalism*, yang menekankan bahwa modal manusia, sains, teknologi, inovasi, *startup*, dan transformasi digital dan hijau (DX dan GX) adalah

hal yang paling penting untuk merevitalisasi ekonomi Jepang dan mengatasi tantangan masyarakat (Kizuna, 2022). Kontekstualisasi sejarah strategi ekonomi Jepang diperiksa, mencatat pergeseran dari model pertumbuhan pasca-perang menuju mengatasi tantangan era digital, seperti kebutuhan akan transformasi digital dan integrasi prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini mengkaji pergeseran yang terjadi dalam perspektif ekonomi global dari neoliberalisme dan kapitalisme pemegang saham ke arah model yang menggabungkan kepentingan pemangku kepentingan dan tujuan sosial. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat bahwa kapitalisme yang lebih inklusif dan berkelanjutan diperlukan.

Terdapat juga penelitian yang menyoroti gagasan *new capitalism* yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang adil, sementara juga mengadopsi postur pertahanan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman regional. Penelitian Lam, Peng Er dan Lim, Tai-wei (2022) juga berfokus pada kritik, aliansi elektoral partai-parpol dalam pemilihan umum 2021 bersifat strategis terhadap LDP, dimana hal ini mencerminkan lanskap politik dan sikap publik terhadap pertahan dan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, pertimbangan Jepang mengenai kemampuan serangan pendahuluan menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pasca perang, yang dimana berpotensi mengubah sikap pasifisnya dan mempengaruhi persepsi regional. Penelitian ini juga menganalisis gagasan *new capitalism* dalam mempromosikan digitalisasi dan stimulus ekonomi, termasuk rekor anggaran untuk pemulihan pandemi, menunjukkan

perpaduan kontinuitas dan perubahan dari kebijakan ekonomi sebelumnya (Lam, Peng Er, Lim, Tai-Wei, 2022). Disamping itu, hubungan dengan Tiongkok dengan upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral di samping tekanan domestik dan internasional, yang dimana menunjukkan kompleksitas kebijakan luar negeri Jepang di bawah Kishida. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyoroti dampak dari gagasan tersebut adalah pengeluaran anggaran negara untuk memperkuat pertahanan keamanan di tengah tantangan keuangan seperti pemulihan pandemi COVID-19.

Selanjutnya, Shiho Kino (2023) juga menyoroti permasalahan lansia Jepang yang mengalami isolasi sosial dan kesepian karena kehilangan kerabat terdekat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan isolasi sosial dan kesepian di kalangan orang dewasa Jepang yang lebih tua. Penelitian ini menemukan bahwa status sosial ekonomi yang lebih rendah, masalah kesehatan, dan tidak bekerja adalah faktor utama yang berkontribusi pada kondisi ini. Para peneliti menggunakan data dari Studi Evaluasi Gerontologis Jepang. Mereka menemukan hubungan antara berbagai elemen dan isolasi sosial atau kesepian dengan menggunakan analisis regresi Poisson (Shiho, K., 2023). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti membedakan antara individu yang terisolasi secara sosial tetapi tidak kesepian dan mereka yang merasa kesepian tetapi tidak terisolasi secara sosial, menunjukkan intervensi yang disesuaikan mungkin diperlukan.

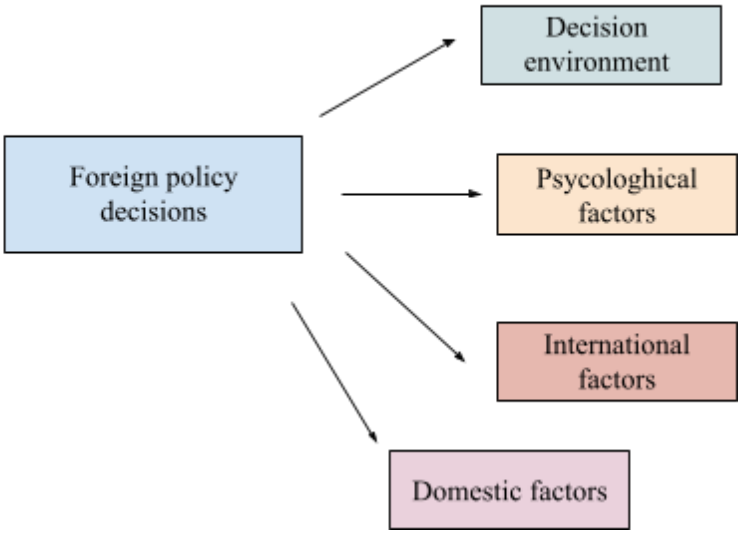
Analisis dampak Abenomics dan peran ekspektasi pasar di Jepang. Penelitian dari Masazumi Wakatabe (2019) yang menyoroti fokus penelitian adalah bagaimana orang melihat kebijakan Gubernur Bank of Japan, Kuroda dan bagaimana hal itu berdampak pada pasar keuangan dan proses pembuatan kebijakan. Hal ini meneliti perdebatan akademis dan praktis tentang pelonggaran kuantitatif di Jepang dan menggunakan analisis etnografi untuk memahami respons pasar yang kuat terhadap pengumuman kebijakan Kuroda yang tampaknya tidak baru. Selain itu, penelitian ini menyelidiki konsekuensi yang lebih luas dari kebijakan penargetan inflasi. Penelitian ini menunjukkan kekhawatiran tentang dampak negatif yang dapat terjadi pada berbagai sektor ekonomi sebagai akibat dari pembelian aset bank sentral daripada obligasi pemerintah. Penelitian ini juga mengkaji kebijakan-kebijakan dari gagasan Abenomics, melihat bagaimana kebijakan ini dibuat, digerakkan, dan berdampak pada pasar dan lembaga politik (Wakatabe, M., 2019). Selanjutnya, penelitian menyoroti tentang pendekatan komunikatif yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mengubah ekspektasi pasar; dia berbicara tentang menggunakan sejumlah strategis untuk mengendalikan sentimen pasar.

Dalam penelitian VG Shvydko (2023) membahas tahun pertama Fumio Kishida sebagai Perdana Menteri Jepang, berfokus pada kebijakan ekonominya dan bagaimana ia dibandingkan dengan pendahulunya dan janji pemilihannya. Penelitian ini juga menekankan kelanjutan Abenomics, yang berfokus pada kebijakan moneter dan pajak yang mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi. Hal Ini membahas sikap yang tidak berubah terhadap kebijakan moneter meskipun ada perubahan kepemimpinan, menekankan kelanjutan pinjaman murah dan peningkatan utang publik, sebagian karena peningkatan biaya militer, tanpa rencana segera untuk kenaikan pajak. Dalam penelitian ini menganalisis perencanaan masa depan Jepang dengan konsep Society 5.0 yang bertujuan untuk mencapai harmoni sosial dan ekonomi melalui penggunaan teknologi canggih dan kecerdasan buatan (Shvydko, V. G., 2023). Hal tersebut memberikan latar belakang untuk memahami tujuan kebijakan ekonomi Jepang yang lebih luas. Penelitian ini juga menekankan penekanan Kishida pada mekanisme redistributif dan memperluas penerima manfaat sistem pasar kapitalis, meskipun tindakan pemerintah yang spesifik di bidang ini belum terlihat. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak pandemi dan ketegangan geopolitik dengan memberikan bantuan kepada bisnis dan rumah tangga serta bertujuan untuk diversifikasi atau lokalisasi rantai perdagangan dan produksi yang penting.

Secara garis besar, tinjauan literatur ini mengelaborasi beberapa analisis terkait kondisi ekonomi dan sosial Jepang pasca terpilihnya Kishida sebagai Perdana Menteri, dengan berfokus pada dampak terhadap pasar saham, perubahan kebijakan ekonomi, hingga permasalahan sosial seperti isolasi dan kesepian di kalangan lansia. Kemudian, permasalahan tersebut diringkas menjadi sebuah bentuk strategi yang diusulkan oleh Kishida, yaitu gagasan *new capitalism*. Kishida memperkenalkan gagasan ini sebagai bentuk merevitalisasi perekonomian Jepang yang beberapa tahun belakangan ini mengalami stagnasi. Gagasan ini menekankan khususnya dalam hal pentingnya sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, inovasi, *start-up*, serta transformasi digital dan hijau (DX dan GX). Gagasan Ini juga berusaha menggabungkan tujuan sosial dan kepentingan pemangku kepentingan dalam struktur kapitalisme yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penulis sebelumnya telah menguraikan secara mendalam faktor-faktor internal yang mendasari gagasan *new capitalism*. Kini, penelitian ini akan beralih fokus pada faktor-faktor eksternal dengan menyoroti respons Jepang dalam merumuskan strategi *new capitalism* di tengah persaingan ketat antara dua raksasa ekonomi dunia, Tiongkok dan AS.

1.4.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Faktor Penentu Keputusan Kebijakan Luar Negeri
Sumber : (Mintz dan DeRouen, 2014)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor internasional mempengaruhi keputusan Jepang dalam merumuskan kebijakan ekonomi melalui gagasan *New Capitalism* di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurut Mintz dan DeRouen (2014), faktor internasional merupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri karena mencakup aktivitas, perilaku, dan interaksi antarnegara yang membentuk lingkungan strategis suatu negara. Faktor ini dapat berupa hubungan aliansi, dinamika kekuatan global, serta perubahan dalam struktur ekonomi dan keamanan internasional yang menuntut adaptasi kebijakan dari setiap negara.

Dalam konteks penelitian ini, Jepang berada di posisi strategis di antara dua kekuatan ekonomi dunia—Amerika Serikat dan Tiongkok—yang keduanya memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ekonomi global. Rivalitas ekonomi antara kedua negara tersebut mendorong Jepang untuk menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonominya dengan kedua belah pihak. Jepang

harus mempertahankan hubungan keamanan dan teknologi dengan AS, sembari tetap menjaga ketergantungan ekonominya pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama.

Gagasan *New Capitalism* yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan dan peluang dari lingkungan internasional tersebut. Melalui *New Capitalism*, Jepang berupaya memperkuat inovasi domestik, meningkatkan investasi teknologi hijau dan digital, serta mendorong kerja sama ekonomi yang lebih inklusif di tingkat global. Strategi ini bukan hanya upaya untuk memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga bagian dari diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi ketidakpastian sistem ekonomi internasional yang didominasi oleh rivalitas AS–Tiongkok.

Dengan demikian, faktor internasional berperan sebagai variabel kunci yang memengaruhi pembentukan dan arah kebijakan ekonomi Jepang. Kerangka pemikiran ini menekankan bahwa setiap langkah kebijakan ekonomi Jepang melalui *New Capitalism* tidak dapat dilepaskan dari konteks global—baik dalam aspek geopolitik, perdagangan internasional, maupun transformasi ekonomi dunia yang saling berinterdependensi.

1.5. Operasionalisasi Konsep

1.5.1. Definisi Konseptual

1.5.1.1. Lingkungan Pengambil Kebijakan

Dalam lingkungan pengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri merujuk pada konteks atau situasi dimana para pemimpin dan pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan pengaruh dari lingkungan hubungan internasional mereka. Lingkungan ini dapat mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lingkungan tersebut bergantung pada karakteristik seorang pemimpin dan pembuat kebijakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun pemimpin yang lebih intuitif dimana memutuskan suatu kebijakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan, pemimpin yang cenderung analitis mungkin mengambil lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan berbagai aspek.

1.5.1.2. Faktor Psikologis

Merumuskan kembali teori yang telah dikembangkan sebelumnya, penulis beranggapan terhadap faktor psikologis, yaitu dimana psikologi ini memainkan peran penting dalam menentukan seorang pemimpin ini membuat suatu keputusan. Adapun faktor psikologis ini membentuk karakteristik seorang pemimpin pada

variabel psikologis seperti kepribadian, emosi, gaya kepemimpinan, dan pencitraan. Misalnya, pada konteks emosi dari seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi persepsi, penilaian, dan pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pembuat keputusan. Hal itu dikarenakan emosi adalah salah satu cara pemimpin dalam merespon suatu kondisi, khususnya ketika terjadinya suatu konflik. Emosi pun dapat dimanifestasikan dengan berbeda-beda, baik itu dengan ketakutan atau kekhawatiran, kemarahan, optimisme, empati maupun kebanggaan.

1.5.1.3. Faktor Internasional

Penulis memiliki pandangan terhadap faktor internasional, yaitu dimana faktor ini menentukan suatu kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin yang akan berdampak pada tingkat global yang mempengaruhi cara suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya. Interaksi antar negara juga dapat menjadi rujukan dalam faktor internasional. Faktor internasional pun juga dapat dibagi menjadi beberapa aspek, seperti salah satunya dalam konteks hubungan bilateral. Kebijakan luar negeri suatu negara sering dipengaruhi oleh hubungannya dengan negara lain. Ini termasuk aliansi, kemitraan strategis, konflik, atau kerjasama dalam bidang tertentu seperti perdagangan, keamanan, atau lingkungan.

1.5.1.4. Faktor Domestik

Selanjutnya, penulis juga memiliki pemikiran tentang faktor domestik. Faktor domestik ini dibentuk karena adanya pengaruh domestik dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak signifikan pada pembentukan, implementasi, dan keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor domestik ini juga memiliki variabel yang berbeda-beda, diantaranya adalah faktor domestik yang dipengaruhi oleh opini publik dan tekanan politik dari dalam negeri yang seringkali membatasi ruang lingkup kebijakan luar negeri yang dapat diambil oleh pembuat keputusan. Selain itu, struktur dan proses politik dalam suatu negara, termasuk kelembagaan legislatif dan eksekutif, juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Bukan hanya itu, persaingan politik dalam negeri, pembagian kekuasaan antar cabang pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan oposisi politik juga dapat membentuk preferensi kebijakan luar negeri.

1.5.2. Definisi Operasional

1.5.2.1. Lingkungan Pengambil Kebijakan

Dalam lingkungan pengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh kondisi seperti krisis, ketidakpastian, dan ketersediaan informasi, yang dapat membuat keputusan lebih dipengaruhi oleh emosi dan intuisi. Dinamika keputusan, seperti interaksi antara pengambil keputusan, pengaruh penasihat, politik birokrasi, dan pemikiran kelompok, juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil keputusan.

Sebagai salah satu partai politik terbesar dan paling dominan di Jepang, Partai Demokratik Liberal Jepang (LDP), menekankan lingkungan pengambil kebijakan yang mencerminkan kompleksitas politik dan sosial negara tersebut. LDP sendiri terdiri dari beberapa faksi yang masing-masing memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menavigasi dan mengelola hubungan antara faksi-faksi ini dengan tujuan mencapai konsensus. LDP memiliki strategi yang cenderung konservatif, pro-bisnis, dan mendukung aliansi keamanan, terutama dengan AS. Ideologi dan strategi ini membentuk kerangka kerja untuk pengambilan keputusan.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, terutama hubungan mitra dagang dengan AS, Tiongkok, dan negara-negara lainnya, tentu saja dapat mempengaruhi keputusan LDP. Proses pengambilan keputusan sering kali melibatkan forum diskusi dan negosiasi di antara beberapa faksi internal untuk mencapai konsensus. Khususnya anggota senior dan veteran partai,

yang dimana memiliki pengalaman dan pengaruh, sering kali memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam rangka menafsirkan bagaimana keputusan yang disusun dalam LDP, sangat *crusial* untuk memandang bagaimana interaksi dari berbagai faktor dengan menciptakan dinamika yang kompleks dan berlapis-lapis dalam proses politik dan kebijakan di Jepang.

1.5.2.2. Faktor Psikologis

Pursiainen dan Forsberg (2021) menyelidiki beberapa teknik psikologis utama, termasuk rasionalitas terbatas, teori prospek, sistem kepercayaan, bias kognitif, emosi, teori kepribadian, dan kepercayaan, untuk lebih menghargai kontribusi dan keterbatasannya dalam bidang kebijakan luar negeri. Kelebihan dan kekurangan teori-teori psikologis ini diidentifikasi melalui analisis komparatif.

Dalam konteks kepribadian dan kepemimpinan, Fumio Kishida dikenal sebagai pemimpin yang cenderung kolaboratif dan mencari konsensus. Hal tersebut dapat dimungkinkan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang dengan mendorong pendekatan diplomasi dan berbasis kerjasama. Kishida juga dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Ini tercermin dalam kebijakan luar negeri yang cenderung mempertahankan aliansi tradisional dan tetap konsisten dalam membuat keputusan.

Contohnya, pada konteks emosi dalam pengambilan suatu kebijakan yaitu dimana keputusan Kishida dalam merumuskan gagasan *new capitalism*. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung adalah salah satu bentuk respon kekhawatiran Kishida dalam melihat perkembangan ekonomi Jepang yang mengalami stagnasi. Oleh karena itu, kekhawatiran ini mendorong Kishida untuk mengejar ketertinggalannya dengan merumuskan gagasan ini. Dengan mengeksplorasi faktor psikologis lebih dalam tentu saja sebagai penulis dapat memahami peran emosi suatu pemimpin dalam keputusan kebijakan luar negeri.

Sebelum menjabat Perdana Menteri, Kishida pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pengalaman ini tentunya memberikan pemahaman secara mendalam tentang diplomasi dan hubungan internasional. Selain itu, gaya kepemimpinan Kishida dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi politik yang berubah. Seperti krisis internasional, Kishida dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan demikian, Kishida memastikan bahwa respon Jepang tetap relevan dan efektif.

1.5.2.3. Faktor Internasional

Dalam faktor internasional dapat dilihat Jepang menanggapi persaingan dua kekuatan ekonomi utama dunia, Tiongkok dan AS melalui strategi gagasan *new capitalism*. Jepang, sebagai negara yang sangat terintegrasi dalam rantai pasokan global, harus mempertimbangkan dampak dari persaingan AS dengan Tiongkok terhadap stabilitas dan

efisiensi rantai pasokan ini. Gagasan *new capitalism* berupaya untuk meminimalisir tantangan ini dengan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi domestik.

Di situasi seperti ini, Jepang harus berhati-hati dalam merespon persaingan kedua raksasa ekonomi tersebut. Khususnya Jepang yang memiliki ketergantungan dengan Tiongkok yang dimana Tiongkok merupakan salah satu pasar terbesar bagi impor dan ekspor Jepang.

Jepang berada di kawasan yang secara geopolitik strategis dan harus menavigasi hubungan yang kompleks dengan negara-negara tetangganya. Perkembangan kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok menjadi pertimbangan Jepang dalam memutuskan untuk mencari dukungan lebih kuat dari AS serta memperkuat posisinya sendiri melalui strategi ekonomi yang lebih inovatif.

Sementara itu, Jepang juga aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *World Trade Organization* (WTO). Keterlibatan ini mengharuskan Jepang untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh rivalitas AS dan Tiongkok.

1.5.2.4. Faktor Domestik

Mengacu pada faktor domestik, Kishida memperkenalkan gagasan new capitalism untuk menciptakan kembali pertumbuhan ekonomi yang telah lama mengalami stagnasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat mendorong pemerintah Jepang untuk mencari pasar baru dan peluang investasi di luar negeri. Ini secara tak langsung memotivasi Jepang untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain, khususnya perdagangan. Di samping itu, Jepang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan lingkungan melalui gagasan ini. Gagasan ini tentu saja sejalan dengan kebijakan luar negeri yang mendukung teknologi bersih dan investasi hijau.

Selain mendorong investasi teknologi, Jepang juga mendukung adanya kebijakan terkait tenaga kerja migran, baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu maupun masalah demografis karena angka kelahiran di Jepang yang setiap tahunnya merosot. Hal ini membuat angka usia produktif Jepang terus berkurang.

1.6. Argumen penelitian

Penelitian ini menjadi semakin esensial di era modern karena melihat bagaimana Jepang merespon terhadap persaingan ekonomi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan memanfaatkan gagasan *new capitalism*. Jepang, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, memainkan peran penting dalam memahami dan menanggapi perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi global. gagasan ini menekankan inovasi, inklusi, dan keberlanjutan, muncul sebagai tanggapan terhadap pergeseran paradigma yang terjadi dalam struktur ekonomi global. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana Jepang menyesuaikan diri dengan dinamika persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta bagaimana konsep ekonomi baru sangat penting bagi Jepang untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka dalam tatanan ekonomi global yang terus berubah.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis Jepang dalam menanggapi persaingan ekonomi global antara AS dan Tiongkok yang mendorong perubahan kebijakan melalui gagasan *new capitalism*.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *desk research* dengan mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana Jepang menanggapi persaingan ekonomi antara AS dan Tiongkok. Kebijakan ekonomi, strategi bisnis, dan pernyataan resmi dari pemerintah, lembaga riset ekonomi, dan organisasi bisnis Jepang dapat menjadi contohnya.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah respon kebijakan Jepang melalui gagasan *new capitalism* di era Fumio Kishida.

1.7.4 Jenis Sumber Penelitian

Terdapat jenis sumber penelitian yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana penelitian tersebut mengambil data dari berbagai literatur atau artikel yang membahas topik yang terkait.

1.7.5 Sumber data

Penelitian ini mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan media massa dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti di JSTOR, Google Scholar, PubMed, dan lain sebagainya.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi data

Analisis data dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan metode kongruen untuk mencari faktor kausalitas (sebab-akibat). Metode kongruen ini biasa dikenal sebagai metode "kesebangunan", lebih tepatnya, seberapa baik data yang berhasil dikumpulkan dan konsisten dengan teori yang digunakan (Rosyidin, 2020). Oleh karena itu, penggunaan metode ini sangat cocok untuk penelitian model kausalitas dimana peneliti menganalisis dengan menemukan dan membuktikan faktor sebab akibat pada fenomena tertentu terjadi (George and Bennet, 2005). Metode ini memiliki karakteristik tersendiri, khususnya untuk membuktikan hubungan kausalitas persaingan ekonomi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dimana Jepang harus meninjau ulang kebijakan ekonominya untuk tetap relevan dan kompetitif. Persaingan ini menimbulkan tekanan dari luar yang mendorong negara untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru, seperti *new capitalism*.